



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 11 Januari 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU)
UNIT KERJA : KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MUHAMAD ALI ZAENAL ABIDIN
2. Jabatan : KETUA
3. NHK : 631629

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 359.600.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 399 m2/90 m2 di TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 359.600.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 24.500.000

1. MOTOR, YAMAHA VIXION MANUAL Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 17.500.000
2. MOTOR, HONDA BEAT MATIC Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 50.500.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ---

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 20.000.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ---

Sub Total Rp. 454.600.000

III. HUTANG Rp. ---

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 454.600.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 15 Januari 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU)
UNIT KERJA : KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : AKHMAD SUBAGJA
2. Jabatan : ANGGOTA
3. NHK : 629364

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	650.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m2/80 m2 di TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 650.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	2.500.000
1. MOTOR, HONDA SCOOPY Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 2.500.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	23.400.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	11.102.435
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	687.002.435
III. HUTANG	Rp.	80.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	607.002.435

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 18 Januari 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU)
UNIT KERJA : KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **IMRON MAHRUS**
2. Jabatan : **ANGGOTA**
3. NHK : **637378**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. **410.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 143 m²/143 m² di TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 60 m²/50 m² di TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 260.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. **6.000.000**

1. MOTOR, HONDA BEAT MATIC Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. **3.800.000**

D. SURAT BERHARGA Rp. **---**

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. **---**

F. HARTA LAINNYA Rp. **---**

Sub Total Rp. **419.800.000**

III. HUTANG Rp. **208.800.000**

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. **211.000.000**

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 14 Januari 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU)
UNIT KERJA : KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : WAHYU DIANA MULYA
2. Jabatan : ANGGOTA
3. NHK : 629342

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 500.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 72 m²/96 m² di TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 125.300.000

1. MOTOR, SANEX GAMMA / SOLO Tahun 2000, HASIL SENDIRI Rp. 300.000
2. MOTOR, HONDA NC 11B1C AT / SOLO Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000
3. MOBIL, HONDA MOBILIO DD4 1.5 E M-CVT Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000
4. LAINNYA, X2FIT MOTORIZED TREADMILL VIGOR Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 3.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 52.800.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 2.700.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 680.800.000

III. HUTANG Rp. 232.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 448.800.000

Catatan:



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 12 Januari 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU)
UNIT KERJA : KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ITA NURHAYATI
2. Jabatan : ANGGOTA
3. NHK : 637372

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	----
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	----
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	15.700.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	9.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	24.700.000
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	24.700.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.